`

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol selama satu periode pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala Satuan Kerja Perankat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada periode 2024, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan:

5.3Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

5.4Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

5.5Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

5.6Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5.7Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Disamping itu, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

5.7.1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

5.7.1.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

5.7.1.1.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.7.1.1.4 Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

5.7.1.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 November 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 November 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Beban

5.3.2. Surplus Defisit Non Operasional

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB 7 PENUTUP

LAMPIRAN TAMBAHAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28% (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari nasional (5,12%). Secara triwulanan (qtq), pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 1,87% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Dengan kontribusi sebesar 14,43% terhadap perekonomian Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati posisi keempat terbesar. Tingkat inflasi Agustus 2025 juga terkendali di level 2,48% (yoy), dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Rembang (2,82%) dan terendah di Kota Surakarta (2,09%).

Indikator kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin 3,37 juta jiwa atau berkurang 29,65 ribu orang. Ketimpangan pendapatan turut membaik dengan rasio sebesar 0,359, menurun dari 0,364 pada September 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 tercatat 4,33%, turun dibandingkan Februari 2024 (4,39%) dan lebih baik dari nasional (4,76%).

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025 berada di angka 108,5, yang menandakan optimisme masyarakat tetap terjaga. Indikator sektoral juga mendukung seperti Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2025 tercatat 116,35, naik dari Juli 2025 (115,59), terutama ditopang subsektor hortikultura dan tanaman pangan. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turut mengalami peningkatan menjadi 99,79 dari 98,92 pada Juli 2025. Capaian positif kesejahteraan ini tidak lepas dari peran APBN sebagai instrumen fiskal utama, melalui belanja negara dan Transfer ke Daerah yang memperkuat ketahanan ekonomi serta mendukung program perlindungan sosial, infrastruktur, dan sektor produktif masyarakat Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik merilis, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara *Year On Year*. BPS mencatat, pertumbuhan itu lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen. Sejumlah faktor turut mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Di antaranya, pertumbuhan aktivitas barang dan jasa di Jawa Tengah. Tercatat, ekspor nonmigas pada periode yang sama (Triwulan III 2025 dibanding Triwulan 2024) tumbuh 22,69 persen secara tahunan. Kemudian jumlah penumpang kereta api, pesawat, dan pengguna jalan bebas hambatan juga bertambah. Selain itu, sektor investasi juga berdampak, ditandai dengan kenaikan impor barang modal secara konsisten, sejalan dengan kebutuhan mesin untuk industri.

Kontribusi ekonomi Jawa Tengah didominasi empat lapangan usaha yaitu industri pengolahan yang menyumbang 33,43 persen, perdagangan menyumbang 13,44 persen, pertanian menyumbang 12,88 persen, dan sektor konstruksi menyumbang 11,82 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian

Jateng dengan kontribusi sebesar 60,64 persen. Secara regional antarprovinsi se-Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi YoY tertinggi di Triwulan III, dengan 5,37 persen. Provinsi DI Yogyakarta mencatat pertumbuhan 5,40 persen, Banten 5,29 persen, Jawa Timur dengan 5,22 persen, Jawa Barat 5,20 persen dan DKI Jakarta 4,96 persen. Pulau Jawa ada enam provinsi, Jateng merupakan provinsi besar yang memiliki pertumbuhan tertinggi kedua setelah Yogyakarta. Kontribusi perekonomian Jawa Tengah sebesar 14,50 persen terhadap perekonomian di pulau Jawa, atau 8,22 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat, dengan tetap mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan dengan membuat kebijakan sebagai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan APBD maupun kebijakan mendukung pelaksanaan teknis kegiatan.

2.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di SKPD

Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Kebijakan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan pada tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang ditunjukkan dengan kemiskinan yang semakin menurun, pendapatan per kapita yang semakin meningkat, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, dengan sasaran meliputi:

1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan adaptif;
3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Jika dilihat lebih lanjut dalam Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, maka telah dirumuskan juga keterkaitan antara indikator daerah dan perangkat daerah dimana Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah akan mendukung sasaran ke 4 yakni terkait dengan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dimana tujuan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan indikator Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan, sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya stabilitas politik dan Meningkatnya ketahanan bangsa. Sasaran dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

2.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2024 direncanakan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh antara lain melalui:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
b. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
c. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (BUDIMAN);
d. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
e. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (*New* Sakpole);
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;

h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
i. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
k. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan Perangkat Daerah serta mengembangkan potensi usaha; dan
l. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.3 Kebijakan Belanja SKPD

Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah setelah perubahan adalah sebesar Rp199.262.149.000,00. Struktur belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari SKPD yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
   a) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
   b) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan manfaat;
   c) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
   d) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yaitu Belanja Peralatan dan Mesin, terdiri dari:
      - Belanja Modal Alat Rumah Tangga, yaitu Mebel dan Alat Pendingin
      - Belanja Modal Komputer, yaitu Komputer Unit

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

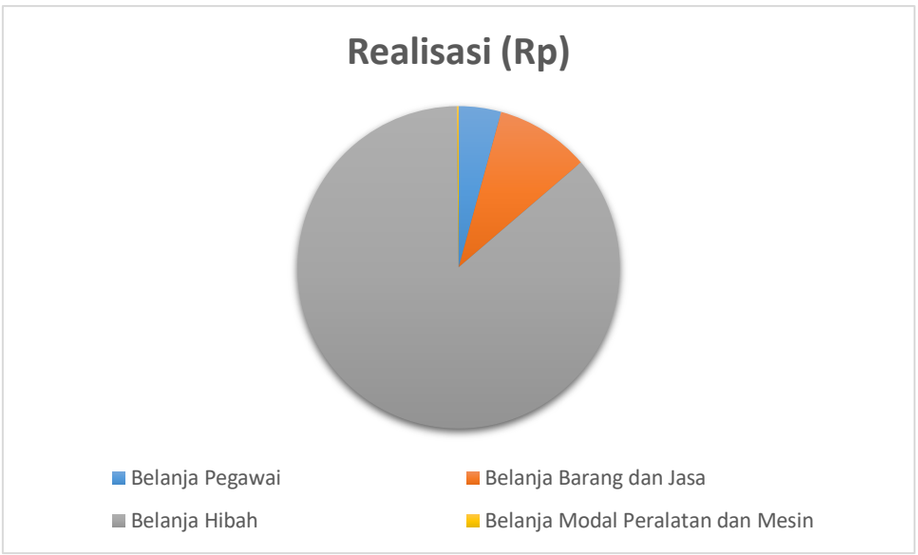
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Perkembangan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Grafik 1 Tren Realisasi Belanja Badan Kesbangpol (2022-2025)

Proporsi realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 2 Proporsi Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2024

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang	Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
5	**BELANJA DAERAH**	199.262.149.000	196.095.397.966	98,41	3.166.751.034	
5.1	**BELANJA OPERASI**	198.862.149.000	195.738.624.266	98,43	3.123.524.734	
5.1.1	Belanja Pegawai	9.551.133.000	8.354.175.849	87,47	1.196.957.151	Adanya Pegawai Pensiun dan Beberapa Jabatan Struktural masih kosong, sehingga anggaran yang disiapkan tidak terealisasi
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.634.000	3.837.565.320	85,84	633.068.680	Gaji PPPK yang baru masuk dibayarkan mulai bulan Juli, sedangkan anggaran nya dari awal tahun
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.137.274.000	2.892.407.927	92,19	244.866.073	
5.1.1.1.1.1	**Belanja Gaji Pokok PNS**	2.783.186.000	2.566.677.279	92,22	216.508.721	
5.1.1.1.1.2	**Belanja Gaji Pokok PPPK**	354.088.000	325.730.648	91,99	28.357.352	
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	312.382.000	253.721.267	81,22	58.660.733	
5.1.1.1.2.1	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**	270.088.000	235.172.539	87,07	34.915.461	
5.1.1.1.2.2	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**	42.294.000	18.548.728	43,86	23.745.272	
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.942.000	102.130.000	52,66	91.812.000	
5.1.1.1.3.1	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**	193.942.000	102.130.000	52,66	91.812.000	
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.200.000	81.900.000	59,69	55.300.000	
5.1.1.1.4.1	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**	81.886.000	64.400.000	78,65	17.486.000	
5.1.1.1.4.2	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**	55.314.000	17.500.000	31,64	37.814.000	
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.406.000	84.410.000	92,35	6.996.000	
5.1.1.1.5.1	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**	91.406.000	84.410.000	92,35	6.996.000	
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	166.800.000	140.301.680	84,11	26.498.320	
5.1.1.1.6.1	**Belanja Tunjangan Beras PNS**	139.116.000	123.765.780	88,97	15.350.220	
5.1.1.1.6.2	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**	27.684.000	16.535.900	59,73	11.148.100	
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.032.000	24.373.557	22,35	84.658.443	
5.1.1.1.7.1	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**	109.032.000	24.373.557	22,35	84.658.443	
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	112.000	37.790	33,74	74.210	
5.1.1.1.8.1	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**	56.000	31.676	56,56	24.324	
5.1.1.1.8.2	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**	56.000	6.114	10,92	49.886	
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	264.295.000	234.750.261	88,82	29.544.739	
5.1.1.1.9.1	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**	235.410.000	219.858.322	93,39	15.551.678	
5.1.1.1.9.2	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**	28.885.000	14.891.939	51,56	13.993.061	
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.776.000	5.883.178	60,18	3.892.822	

5.1.1.1.10.1	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**	8.362.000	5.154.062	61,64	3.207.938	
5.1.1.1.10.2	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**	1.414.000	729.116	51,56	684.884	
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.084.000	17.649.660	70,36	7.434.340	
5.1.1.1.11.1	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**	22.084.000	15.462.380	70,02	6.621.620	
5.1.1.1.11.2	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**	3.000.000	2.187.280	72,91	812.720	
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.331.000	0	0	23.331.000	Tidak ada realisasi Tapera
5.1.1.1.12.1	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**	18.744.000	0	0	18.744.000	
5.1.1.1.12.2	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**	4.587.000	0	0	4.587.000	
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.080.499.000	4.516.610.529	88,9	563.888.471	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.080.499.000	4.516.610.529	88,9	563.888.471	
5.1.1.2.1.1	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**	5.025.201.000	4.476.110.529	89,07	549.090.471	Jabatan struktural Kepala Badan dan Kepala Bidang masih kosong, sehingga tidak terealisasi
5.1.1.2.1.2	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**	55.298.000	40.500.000	73,24	14.798.000	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.837.626.000	18.546.058.417	98,45	291.567.583	
5.1.2.1	Belanja Barang	3.069.153.000	3.064.078.311	99,83	5.074.689	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.868.903.000	2.863.864.400	99,82	5.038.600	
5.1.2.1.1.4	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**	147.648.000	147.600.000	99,97	48.000	
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**	394.888.000	393.976.000	99,77	912.000	
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**	132.059.000	131.060.400	99,24	998.600	
5.1.2.1.1.27	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**	4.483.000	4.136.000	92,26	347.000	Penggunaan lebih sedikit
5.1.2.1.1.30	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**	57.607.000	57.607.000	100	0	
5.1.2.1.1.31	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**	16.013.000	16.013.000	100	0	
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**	19.068.000	19.068.000	100	0	
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**	227.280.000	226.064.000	99,46	1.216.000	
5.1.2.1.1.53	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**	89.400.000	89.325.000	99,92	75.000	
5.1.2.1.1.58	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**	1.646.637.000	1.645.195.000	99,91	1.442.000	
5.1.2.1.1.76	**Belanja Pakaian Olahraga**	34.300.000	34.300.000	100	0	
5.1.2.1.1.77	**Belanja Pakaian Paskibraka**	99.520.000	99.520.000	100	0	
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.250.000	200.213.911	99,98	36.089	
5.1.2.1.4.35	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**	200.250.000	200.213.911	99,98	36.089	
5.1.2.2	Belanja Jasa	11.271.073.000	11.008.345.665	97,67	262.727.335	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	10.922.642.000	10.668.339.699	97,67	254.302.301	

5.1.2.2.1.3	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**	5.938.955.000	5.855.363.000	98,59	83.592.000	
5.1.2.2.1.4	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**	386.850.000	349.200.000	90,27	37.650.000	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan: Perhitungan awal honor dimulai bulan Juni, tetapi karena pergeseran dilakukan di bulan Oktober, sehingga honor di bulan sebelum pengesahan tidak bisa di belanjakan Bidang Poldagri: KPA Poldagri purna tugas / pensiun
5.1.2.2.1.14	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**	18.600.000	18.600.000	100	0	
5.1.2.2.1.26	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**	1.873.600.000	1.859.200.000	99,23	14.400.000	
5.1.2.2.1.29	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**	3.625.000	3.625.000	100	0	
5.1.2.2.1.30	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	570.110.000	563.873.300	98,91	6.236.700	
5.1.2.2.1.31	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	417.812.000	417.512.908	99,93	299.092	
5.1.2.2.1.39	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**	500.000.000	499.850.000	99,97	150.000	
5.1.2.2.1.46	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**	56.696.000	52.731.680	93,01	3.964.320	Efisiensi
5.1.2.2.1.47	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**	20.000.000	20.000.000	100	0	
5.1.2.2.1.49	**Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**	7.500.000	7.500.000	100	0	
5.1.2.2.1.55	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**	368.407.000	366.855.000	99,58	1.552.000	
5.1.2.2.1.59	**Belanja Tagihan Telepon**	24.000.000	23.991.775	99,97	8.225	
5.1.2.2.1.60	**Belanja Tagihan Air**	13.200.000	8.445.500	63,98	4.754.500	Penggunaan lebih hemat
5.1.2.2.1.61	**Belanja Tagihan Listrik**	331.800.000	305.162.536	91,97	26.637.464	Penggunaan lebih hemat
5.1.2.2.1.62	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**	6.737.000	6.737.000	100	0	
5.1.2.2.1.67	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**	34.750.000	22.992.000	66,16	11.758.000	Sesuai tagihan Bapenda
5.1.2.2.1.80	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**	350.000.000	286.700.000	81,91	63.300.000	PA dan beberapa KPA masih kosong
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	162.660.000	158.789.115	97,62	3.870.885	
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**	69.638.000	66.768.000	95,88	2.870.000	Beberapa Non ASN diterima menjadi PPPK
5.1.2.2.2.6	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**	7.329.000	6.908.880	94,27	420.120	
5.1.2.2.2.7	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**	5.693.000	5.572.800	97,89	120.200	
5.1.2.2.2.8	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**	80.000.000	79.539.435	99,42	460.565	
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000	98.350.000	100	0	
5.1.2.2.4.34	**Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya**	67.950.000	67.950.000	100	0	
5.1.2.2.4.36	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**	30.400.000	30.400.000	100	0	
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.800.000	18.800.000	86,24	3.000.000	
5.1.2.2.5.9	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**	21.800.000	18.800.000	86,24	3.000.000	Beberapa kegiatan tidak menggunakan sewa ruang
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	65.621.000	64.066.851	97,63	1.554.149	

	Pelatihan					
5.1.2.2.12.1	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**	24.608.000	24.066.851	97,8	541.149	
5.1.2.2.12.2	**Belanja Sosialisasi**	16.405.000	16.000.000	97,53	405.000	
5.1.2.2.12.3	**Belanja Bimbingan Teknis**	24.608.000	24.000.000	97,53	608.000	
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	477.257.000	463.687.016	97,16	13.569.984	
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.898.000	85.991.744	95,65	3.906.256	
5.1.2.3.2.22	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set**	7.000.000	7.000.000	100	0	
5.1.2.3.2.117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**	7.157.000	3.474.744	48,55	3.682.256	Efisiensi
5.1.2.3.2.118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**	1.921.000	1.900.000	98,91	21.000	
5.1.2.3.2.121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**	22.970.000	22.867.000	99,55	103.000	
5.1.2.3.2.405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**	50.850.000	50.750.000	99,8	100.000	
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.359.000	377.695.272	97,51	9.663.728	
5.1.2.3.3.1	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**	49.554.000	45.604.848	92,03	3.949.152	
5.1.2.3.3.2	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang**	328.155.000	322.440.424	98,26	5.714.576	
5.1.2.3.3.36	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman**	9.650.000	9.650.000	100	0	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.143.000	4.009.947.425	99,75	10.195.575	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.020.143.000	4.009.947.425	99,75	10.195.575	
5.1.2.4.1.1	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**	2.715.946.000	2.707.662.425	99,7	8.283.575	
5.1.2.4.1.3	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**	3.000.000	2.963.000	98,77	37.000	
5.1.2.4.1.4	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**	101.605.000	101.605.000	100	0	
5.1.2.4.1.5	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**	1.199.592.000	1.197.717.000	99,84	1.875.000	
5.1.5	Belanja Hibah	170.473.390.000	168.838.390.000	99,04	1.635.000.000	
5.1.5.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.1.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.1.1.1	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	31.082.470.000	31.082.470.000	100	0	
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	
5.1.5.5.3.1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	101.304.738.000	99.669.738.000	98,39	1.635.000.000	

5.1.5.7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.1.5.7.1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.1.5.7.1.1	**Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	38.086.182.000	38.086.182.000	100	0	
5.2	**BELANJA MODAL**	400.000.000	356.773.700	89,19	43.226.300	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000	356.773.700	89,19	43.226.300	
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.375.000	124.225.700	84,29	23.149.300	
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	147.375.000	124.225.700	84,29	23.149.300	
5.2.2.5.2.1	**Belanja Modal Mebel**	50.000.000	47.558.700	95,12	2.441.300	
5.2.2.5.2.4	**Belanja Modal Alat Pendingin**	41.250.000	35.997.000	87,27	5.253.000	Efisiensi
5.2.2.5.2.6	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**	56.125.000	40.670.000	72,46	15.455.000	Efisiensi
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.6.1.1	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**	59.000.000	58.000.000	98,31	1.000.000	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	
5.2.2.10.1.2	**Belanja Modal Personal Computer**	193.625.000	174.548.000	90,15	19.077.000	Efisiensi
	Jumlah Belanja	199.262.149.000	196.095.397.966	98,41	3.166.751.034	
	Surplus/(Defisit)	0	-196.095.397.966	100	196.095.397.966	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	-196.095.397.966	100	196.095.397.966	

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi. Hanya saja, dalam pengelolaan belanja terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu penginputan transaksi belanja pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) terhambat karena aplikasi yang terlalu sering error pada jam kerja.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Basis Akrual dan Basis Kas. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan, Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja adminsitrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, maka

komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. JATENG

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penjelasan mengenai anggaran dan realisasi APBD TA 2025 adalah sebagai berikut:

5.1.1 BELANJA DAERAH Rp196.095.397.966,00

5.1.2	BELANJA DAERAH						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Operasional	198.862.149.000,00	195.738.624.266,00	98,43	857.891.946.837,00	(662.153.322.571,00)	(77,18)
2	Belanja Modal	400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)
3	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	-	
4	Belanja Transfer	-	-		-	-	
	Jumlah	**199.262.149.000,00**	**196.095.397.966,00**	**98,41**	**858.737.253.837,00**	**(662.641.855.871,00)**	**(77,16)**

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp199.262.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.095.397.966,00 atau 98,41 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp858.737.253.837,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp662.641.855.871,00 atau 77,16 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2 BELANJA OPERASIONAL Rp195.738.624.266,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp198.862.149.000,00 dengan realisasi sebesar Rp195.738.624.266,00 atau 98,43 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp857.891.946.837,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp662.153.322.571,00 atau 77,18 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1	BELANJA OPERASIONAL						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	9.551.133.000,00	8.354.175.849,00	87,47	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)
2	Belanja Barang dan Jasa	18.837.626.000,00	18.546.058.417,00	98,45	19.728.684.731,00	(1.182.626.314,00)	(5,99)
3	Belanja Bunga	-	-		-	-	
4	Belanja Subsidi	-	-		-	-	
5	Belanja Hibah	170.473.390.000,00	168.838.390.000,00	99,04	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	-	
	Jumlah	**198.862.149.000,00**	**195.738.624.266,00**	**98,43**	**857.891.946.837,00**	**(662.153.322.571,00)**	**(77,18)**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp8.354.175.849,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp9.551.133.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.354.175.849,00 atau 87,47 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.277.636.106,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp923.460.257,00 atau 9,95 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1	Belanja Pegawai						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.634.000,00	3.837.565.320,00	85,84	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-		217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-		-	-	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-		-	-	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-		-	-	
7	Belanja Pegawai BOS	-	-		-	-	
8	Belanja Pegawai BOSP	-	-		-	-	
9	Belanja Pegawai BLUD	-	-		-	-	
	Jumlah	**9.551.133.000,00**	**8.354.175.849,00**	**87,47**	**9.277.636.106,00**	**(923.460.257,00)**	**(9,95)**

Belanja Pegawai **tidak mencapai target*** dikarenakan :

a) Adanya Pegawai Pensiun dan Beberapa Jabatan Struktural masih kosong, sehingga anggaran yang disiapkan tidak terealisasi

b) Gaji PPPK yang baru masuk dibayarkan mulai bulan Juli, sedangkan anggaran nya dari awal tahun

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.837.565.320,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp4.470.634.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.837.565.320,00 atau 85,84 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.909.549.190,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp71.983.870,00 atau 1,84 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.137.274.000,00	2.892.407.927,00	92,19	2.891.795.600,00	612.327,00	0,02
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	312.382.000,00	253.721.267,00	81,22	269.843.030,00	(16.121.763,00)	(5,97)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.942.000,00	102.130.000,00	52,66	138.740.000,00	(36.610.000,00)	(26,39)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.200.000,00	81.900.000,00	59,69	79.940.800,00	1.959.200,00	2,45
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.406.000,00	84.410.000,00	92,35	92.530.000,00	(8.120.000,00)	(8,78)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	166.800.000,00	140.301.680,00	84,11	140.784.480,00	(482.800,00)	(0,34)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.032.000,00	24.373.557,00	22,35	22.793.470,00	1.580.087,00	6,93
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	112.000,00	37.790,00	33,74	39.426,00	(1.636,00)	(4,15)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	264.295.000,00	234.750.261,00	88,82	249.358.710,00	(14.608.449,00)	(5,86)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.776.000,00	5.883.178,00	60,18	5.930.880,00	(47.702,00)	(0,80)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.084.000,00	17.649.660,00	70,36	17.792.794,00	(143.134,00)	(0,80)
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.331.000,00	-	-	-	-	
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-		-	-	
14	Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-		-	-	
15	Belanja Zakat ASN	-	-		-	-	
	Jumlah	**4.470.634.000,00**	**3.837.565.320,00**	**85,84**	**3.909.549.190,00**	**(71.983.870,00)**	**(1,84)**

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp4.516.610.529,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp5.080.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.516.610.529,00 atau 88,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.150.726.916,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp634.116.387,00 atau 12,31 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-		-	-	
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-		-	-	
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-		-	-	
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-		-	-	
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-		-	-	
	Jumlah	**5.080.499.000,00**	**4.516.610.529,00**	**88,90**	**5.150.726.916,00**	**(634.116.387,00)**	**(12,31)**

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp217.360.000,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp217.360.000,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-		-	-	
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-		-	-	
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-		-	-	
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-		-	-	
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-		-	-	
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-		-	-	
7	Belanja Honorarium	-	-		217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-		-	-	
9	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-		-	-	
10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-		-	-	
11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	-	-		-	-	
12	Belanja Tunjangan Khusus bagi Pengelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	-	-		-	-	
	Jumlah	-	-		**217.360.000,00**	**(217.360.000,00)**	**(100,00)**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp18.546.058.417,00

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 18.837.626.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.546.058.417,00 atau 98,45 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.728.684.731,00 mengalami **penurunan*** sebesar Rp 1.182.626.314,00 atau 5,99 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	3.069.153.000,00	3.064.078.311,00	99,83	2.682.767.600,00	381.310.711,00	14,21
2	Belanja Jasa	11.271.073.000,00	11.008.345.665,00	97,67	8.734.114.397,00	2.274.231.268,00	26,04
3	Belanja Pemeliharaan	477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00	(311.262.289,00)	(40,17)
4	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-		-	-	
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-		-	-	
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	-	-		-	-	
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-		-	-	
	Jumlah	**18.837.626.000,00**	**18.546.058.417,00**	**98,45**	**19.728.684.731,00**	**(1.182.626.314,00)**	**(5,99)**

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target*** dikarenakan :

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp3.064.078.311,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 3.069.153.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.064.078.311,00 atau 99,83 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2.682.767.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 181.096.800,00 atau 6,75 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.1	Belanja Barang						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang Habis Pakai	2.868.903.000,00	2.863.864.400,00	99,82	2.682.767.600,00	181.096.800,00	6,75
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-		-	-	
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-		-	-	
4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.250.000,00	200.213.911,00	99,98			
		3.069.153.000,00	**3.064.078.311,00**	**99,83**	**2.682.767.600,00**	**181.096.800,00**	6,75

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp 11.008.345.665,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 11.271.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.008.345.665,00 atau 97,67 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 8.734.114.397,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.274.231.268,00 atau 26,04 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	10.922.642.000,00	10.668.339.699,00	97,67	8.281.265.524,00	2.387.074.175,00	28,82
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	162.660.000,00	158.789.115,00	97,62	167.612.873,00	(8.823.758,00)	(5,26)
3	Belanja Sewa Tanah	-	-		-	-	
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000,00	98.350.000,00	100,00	115.546.000,00	(17.196.000,00)	(14,88)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.800.000,00	18.800.000,00	86,24	109.690.000,00	(90.890.000,00)	(82,86)
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-		-	-	
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-		-	-	
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-		-	-	
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	-	-		-	-	
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		-	-	
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	65.621.000,00	64.066.851,00	97,63	60.000.000,00	4.066.851,00	6,78
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-		-	-	
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-		-	-	
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-		-	-	
	Jumlah	**11.271.073.000,00**	**11.008.345.665,00**	**97,67**	**8.734.114.397,00**	**2.274.231.268,00**	**26,04**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp463.687.016,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 477.257.000,00 dengan realisasi sebesar Rp463.687.016,00 atau 97,16 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp774.949.305,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 311.262.289,00 atau 40,17 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-		-	-	
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.898.000,00	85.991.744,00	95,65	299.953.158,00	(213.961.414,00)	(71,33)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.359.000,00	377.695.272,00	97,51	474.996.147,00	(97.300.875,00)	(20,48)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		-	-	
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-		-	-	
	Jumlah	477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00	(311.262.289,00)	(40,17)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp4.009.947.425,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 4.020.143.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.009.947.425,00 atau 99,75 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.536.853.429,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 3.526.906.004,00 atau 46,80 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-		-	-	
	Jumlah	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)

5.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp168.838.390.000,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp 170.473.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp168.838.390.000,00 atau 99,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp828.885.626.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 660.047.236.000,00 atau 79,63 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5	Belanja Hibah						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	14.852.183.000,00	
3	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-		-	-	
4	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-		-	-	
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51
6	Belanja Hibah Dana BOS	-	-		-	-	
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
8	Belanja Hibah Dana BOSP	-	-		-	-	
	Jumlah	170.473.390.000,00	168.838.390.000,00	99,04	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)

5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp 31.082.470.000,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp 31.082.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.082.470.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp708.739.472.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 677.657.002.000,00 atau 95,61 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-		-	-	
3	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-		-	-	
	Jumlah	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)

Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	5.552.500.000,00	5.552.500.000,00	100,00	4.063.250.000,00	1.489.250.000,00
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng Pengamanan Pemilu (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	21.029.970.000,00	21.029.970.000,00	100,00	62.696.843.000,00	(41.666.873.000,00)
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	474.965.178.000,00	(474.965.178.000,00)

4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo (Jl. Adi Soemarmo Malangwijan Colonadu Pulosari, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, KAB. KARANGANYAR)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	205.000.000,00	295.000.000,00
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang (Jl. Re. Martadinata No.12, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap (Jl. Niaga No. 2 Klega, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, KAB. CILACAP)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	125.000.000,00	375.000.000,00
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal (Jl. Proklamasi, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah, KOTA TEGAL)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100.000.000,00
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-	250.000.000,00
9	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	116.230.722.000,00	(116.230.722.000,00)
11	Komando Operasi Udara II pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman (Area Sawah, Wirasaba, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, KAB. PURBALINGGA)	-	-	-	125.000.000,00	(125.000.000,00)
12	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	7.545.329.000,00	(7.545.329.000,00)
13	Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Jawa Tengah (Jl. Untung Suropati Kota Semarang, KOTA SEMARANG)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	650.000.000,00	350.000.000,00
14	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Mardukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
15	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
16	Komando Daerah MiliterIV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	2.655.000.000,00	(2.655.000.000,00)
17	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	900.000.000,00	(900.000.000,00)
18	Komando Resor Militer 071/Wijayakusuma	-	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
19	Komando Resor Militer 073/Makutarama	-	-	-	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
20	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	28.428.150.000,00	(28.428.150.000,00)
	Jumlah	**31.082.470.000,00**	**31.082.470.000,00**	**100,00**	**708.739.472.000,00**	**(677.657.002.000,00)**

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp 99.669.738.000,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp 101.304.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

99.669.738.000,00 atau 98,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 84.817.555.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 14.852.183.000,00 atau 17,51 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarlkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		-	-	
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan terdaftar	-	-		-	-	
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,386058	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,510742
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	-	-		-	-	
5	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-	-		-	-	
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-		-	-	
	Jumlah	**101.304.738.000,00**	**99.669.738.000,00**	**98,39**	**84.817.555.000,00**	**14.852.183.000,00**	**17,51**

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp 38.086.182.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp 38.086.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.086.182.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 35.328.599.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.757.583.000,00 atau 7,81% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.5.4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
	Jumlah	**38.086.182.000,00**	**38.086.182.000,00**	**100,00**	**35.328.599.000,00**	**2.757.583.000,00**	**7,81**

Rincian Partai Politik

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.540.522.000,00	10.540.522.000,00	100,00	11.436.936.000,00	(896.414.000,00)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.072.928.000,00	6.072.928.000,00	100,00	5.629.037.000,00	443.891.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.185.772.000,00	5.185.772.000,00	100,00	3.892.255.000,00	1.293.517.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	3.242.138.000,00	3.242.138.000,00	100,00	2.729.993.000,00	512.145.000,00
5	Partai Golongan Karya	4.507.394.000,00	4.507.394.000,00	100,00	3.775.870.000,00	731.524.000,00
6	Partai Demokrat	2.319.820.000,00	2.319.820.000,00	100,00	2.045.608.000,00	274.212.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1.681.634.000,00	1.681.634.000,00	100,00	1.713.433.000,00	(31.799.000,00)
8	Partai Persatuan Pembangunan	2.028.070.000,00	2.028.070.000,00	100,00	2.153.618.000,00	(125.548.000,00)
9	Partai Solidaritas Indonesia	956.126.000,00	956.126.000,00	100,00	318.709.000,00	637.417.000,00
10	Partai Nasional Demokrat	1.551.778.000,00	1.551.778.000,00	100,00	1.633.140.000,00	(81.362.000,00)
	Jumlah	**38.086.182.000,00**	**38.086.182.000,00**	**100,00**	**35.328.599.000,00**	**2.757.583.000,00**

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp 356.773.700,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 356.773.700,00 atau 89,19 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 845.307.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 488.533.300,00 atau 57,79 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2	BELANJA MODAL						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	356.773.700,00	89,19	845.307.000,00	(488.533.300,00)	(57,79)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-	-	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	-	
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	-	
	Jumlah	**400.000.000,00**	**356.773.700,00**	**89,19**	**845.307.000,00**	**(488.533.300,00)**	**(57,79)**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp356.773.700,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp356.773.700,00 atau 89,19 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnyanya

sebesar Rp845.307.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 488.533.300,00 atau 57,79 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-		-	-	
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-		-	-	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00	77,57
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00	
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-		-	-	
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-		-	-	
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-		-	-	
10	Belanja Modal Komputer	193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)	(77,49)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-		-	-	
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-		-	-	
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-		-	-	
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-		-	-	
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-		-	-	
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-		-	-	
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-		-	-	
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-		-	-	
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-		-	-	
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-		-	-	
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	-		-	-	
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-		-	-	
	Jumlah	**400.000.000,00**	**356.773.700,00**	**89,19**	**845.307.000,00**	**(488.533.300,00)**	**(57,79)**

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp124.225.700,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 147.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 124.225.700,00 atau 84,29 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.960.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 54.265.700,00 atau 77,57 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-		-	-	
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00	77,57
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-		-	-	
	Jumlah	**147.375.000,00**	**124.225.700,00**	**84,29**	**69.960.000,00**	**54.265.700,00**	**77,57**

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp58.000.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp59.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.000.000,00 atau 98,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp58.000.000,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Studio	59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-		-	-	
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-		-	-	
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-		-	-	
	Jumlah	**59.000.000,00**	**58.000.000,00**	**98,31**	**-**	**58.000.000,00**	**100,00**

5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Komputer Rp,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 193.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.548.000,00 atau 90,15 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp775,347.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 600.799.000,00 atau 77,49 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.10	Belanja Modal Komputer						
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Komputer Unit	193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)	(77,49)
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-		-	-	
	Jumlah	**193.625.000,00**	**174.548.000,00**	**90,15**	**775.347.000,00**	**(600.799.000,00)**	**(77,49)**

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 17.229.965.616,94

Total Aset sebesar Rp 17.229.965.616,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.549.604.880,16 mengalami **penurunan** sebesar Rp 319.639.263,22 atau 1,82%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Lancar	19.387.594,02	29.003.341,58
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	17.087.411.692,88	17.363.879.365,47
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	123.166.330,04	156.722.173,11
6	Properti Investasi	-	-
	Jumlah	**17.229.965.616,94**	**17.549.604.880,16**

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 19.387.594,02

Aset Lancar sebesar Rp 19.387.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 29.003.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 9.615.747,56 atau 33,15% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1.1 ASET LANCAR

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	-	-
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	-	-
4	Piutang Retribusi Daerah	-	-
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	-	-
10	Penyisihan Piutang	-	-
11	Beban Dibayar Dimuka	18.689.594,02	18.036.341,58
12	Persediaan	698.000,00	10.967.000,00
	Jumlah	**19.387.594,02**	**29.003.341,58**

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp,00

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka		
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		
	Jumlah		

5.2.1.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp 18.689.594,02

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 18.689.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 18.036.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 653.252,44 atau 3,50% dengan rincian

sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	18.689.594,02	18.036.341,58
	Jumlah	**18.689.594,02**	**18.036.341,58**

5.2.1.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rp,00

Beban Dibayar Dimuka-Sewa sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah		
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin		
3	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan		
4	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
5	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tetap Lainnya		
6	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Aset Tidak Berwujud		
	Jumlah		

5.2.1.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah Rp 18.689.594,02

Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp 18.689.594,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 18.036.341,58 mengalami **penurunan** sebesar Rp 653.252,44 atau 3,50% dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	14.364.924,48	13.803.065,42
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	4.324.669,54	4.233.276,16
	Jumlah	**18.689.594,02**	**18.036.341,58**

5.2.1.1.2 Persediaan Rp 698.000,00

Persediaan sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	698.000,00	10.967.000,00
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	Jumlah	**698.000,00**	**10.967.000,00**

5.2.1.1.2.1 Barang Pakai Habis Rp 698.000,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan	-	-
2	Suku Cadang	-	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	698.000,00	10.967.000,00
4	Obat-obatan	-	-

5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7	Natura dan Pakan	-	-
8	Persediaan Penelitian	-	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
	Jumlah	**698.000,00**	**10.967.000,00**

5.2.1.1.2.1.1 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 698.000,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.967.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 10.269.000,00 atau 93,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	430.000,00	6.298.000,00
2	Kertas dan Cover	25.000,00	2.155.000,00
3	Bahan Cetak	-	-
4	Benda Pos	-	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6	Bahan Komputer	200.000,00	2.385.000,00
7	Perabot Kantor	25.000,00	96.000,00
8	Alat Listrik	18.000,00	33.000,00
9	Perlengkapan Dinas	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	-	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
	Jumlah	**698.000,00**	**10.967.000,00**

5.2.1.2 Aset Tetap Rp17.087.411.692,88

Aset Tetap sebesar Rp17.087.411.692,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.363.879.365,47 mengalami **penurunan** sebesar Rp276.467.672,59 atau 1,59% dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3 ASET TETAP

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2	Peralatan dan Mesin	10.272.603.723,00	10.117.085.249,00
3	Gedung dan Bangunan	6.951.230.085,00	6.951.230.085,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	80.619.400,00	80.619.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(12.228.184.515,12)	(11.796.198.368,53)
8	Aset Konsesi Jasa	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
	Jumlah	**17.087.411.692,88**	**17.363.879.365,47**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp17.087.411.692,88
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 356.773.700,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 0,00
Hibah	Rp 0,00
Mutasi Masuk	Rp 0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 54.386.700,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	**Rp 411.160.400,00**
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 54.386.700,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 201.255.226,00
Mutasi Keluar	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	**Rp 255.641.926,00**
Grand Total	**Rp29.315.596.208,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2025.

✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2025 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025.

✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.

✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025.

✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.2.1 Tanah Rp 12.011.143.000,00

Tanah sebesar Rp 12.011.143.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.011.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah Persil	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2	Tanah Non Persil	-	-
3	Lapangan	-	-
	Jumlah	**12.011.143.000,00**	**12.011.143.000,00**

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp,00

Tanah Persil sebesar Rp12.011.143.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.011.143.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7	Tanah Persil Lainnya	-	-
	Jumlah	**12.011.143.000,00**	**12.011.143.000,00**

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp10.272.603.723,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.272.603.723,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.117.085.249,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp155.518.474,00 atau 1,51% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Besar	640.150.000,00	689.909.226,00
2	Alat Angkutan	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Alat Pertanian	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.848.217.199,00	3.782.386.499,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	730.201.000,00	699.001.000,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Persenjataan	-	-
10	Komputer	1.969.377.124,00	1.861.130.124,00
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat Peraga		

		-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**10.272.603.723,00**	**10.117.085.249,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp10.117.085.249,00	
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	356.773.700,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**356.773.700,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	201.255.226,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**201.255.226,00**
Grand Total	**Rp10.272.603.723,00**	

5.2.1.2.2.1 Alat Besar Rp640.150.000,00

Alat Besar sebesar Rp640.150.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp689.909.226,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Besar Darat	-	-
2	Alat Besar Apung	-	-
3	Alat Bantu	640.150.000,00	689.909.226,00
	Jumlah	**640.150.000,00**	**689.909.226,00**

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan Rp3.084.658.400,00

Alat Angkutan sebesar Rp3.084.658.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.084.658.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
	Jumlah	**3.084.658.400,00**	**3.084.658.400,00**

5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.848.217.199,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.848.217.199,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.782.386.499,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp65.830.700,00 atau 1,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Kantor	522.793.440,00	513.393.440,00
2	Alat Rumah Tangga	3.084.551.759,00	3.028.121.059,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	240.872.000,00	240.872.000,00
	Jumlah	**3.848.217.199,00**	**3.782.386.499,00**

5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp730.201.000,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp730.201.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp699.001.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.200.000,00 atau 4,27% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Studio	638.501.000,00	607.301.000,00
2	Alat Komunikasi	91.700.000,00	91.700.000,00
3	Peralatan Pemancar	-	-
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
	Jumlah	**730.201.000,00**	**699.001.000,00**

5.2.1.2.2.5 Komputer Rp1.969.377.124,00

Komputer sebesar Rp1.969.377.124,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.861.130.124,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp108.247.000,00 atau 5,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Komputer Unit	1.337.882.616,00	1.247.452.616,00
2	Peralatan Komputer	631.494.508,00	613.677.508,00
	Jumlah	**1.969.377.124,00**	**1.861.130.124,00**

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp6.951.230.085,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.951.230.085,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.951.230.085,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
2	Monumen	-	-
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	131.650.000,00	131.650.000,00
	Jumlah	**6.951.230.085,00**	**6.951.230.085,00**

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung Rp6.819.580.085,00

Bangunan Gedung sebesar Rp6.819.580.085,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.819.580.085,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-
	Jumlah	**6.819.580.085,00**	**6.819.580.085,00**

5.2.1.2.3.2 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp131.650.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp131.650.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tugu/Tanda Batas	131.650.000,00	131.650.000,00
	Jumlah	**131.650.000,00**	**131.650.000,00**

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya Rp80.619.400,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.619.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	80.619.400,00	80.619.400,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-
3	Hewan	-	-
4	Biota Perairan	-	-
5	Tanaman	-	-
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**80.619.400,00**	**80.619.400,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp80.619.400,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 0,00
Hibah	Rp 0,00
Mutasi Masuk	Rp 0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp54.386.700,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	**Rp54.386.700,00**
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp 0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp54.386.700,00
Mutasi Keluar	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	**Rp54.386.700,00**
Grand Total	**Rp80.619.400,00**

5.2.1.2.4.1 Bahan Perpustakaan Rp80.619.400,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp80.619.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	80.619.400,00	80.619.400,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4	Musik	-	-
5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7	Tarscalt	-	-
	Jumlah	**80.619.400,00**	**80.619.400,00**

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan (Rp12.228.184.515,12)

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp12.228.184.515,12) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp11.796.198.368,53) mengalami **kenaikan** sebesar Rp431.986.146,59 atau 3,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.203.924.259,52)	(8.914.523.668,80)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.024.260.255,60)	(2.881.674.699,73)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	**(12.228.184.515,12)**	**(11.796.198.368,53)**

5.2.1.2.5.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp9.203.924.259,52)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp9.203.924.259,52) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp8.914.523.668,8) mengalami **kenaikan** sebesar Rp289.400.590,72 atau 3,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(640.150.000,00)	(689.909.226,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.084.658.400,00)	(3.012.529.962,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(3.079.538.760,53)	(2.929.427.437,56)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(677.385.100,01)	(655.069.900,01)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.722.191.998,98)	(1.627.587.142,73)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga		

		-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**(9.203.924.259,52)**	**(8.914.523.668,80)**

5.2.1.2.5.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp640.150.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp640.150.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp689.909.226,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(640.150.000,00)	(640.150.000,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	(49.759.226,00)
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountaineering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
	Jumlah	**(640.150.000,00)**	**(689.909.226,00)**

5.2.1.2.5.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (Rp3.084.658.400,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp3.084.658.400,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.012.529.962,5) mengalami **kenaikan** sebesar Rp72.128.437,5 atau 2,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(380.397.000,00)	(332.847.375,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.600.299.400,00)	(2.575.720.587,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(103.962.000,00)	(103.962.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
	Jumlah	**(3.084.658.400,00)**	**(3.012.529.962,50)**

5.2.1.2.5.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp3.079.538.760,53)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp3.079.538.760,53) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.929.427.437,56) mengalami **kenaikan** sebesar Rp150.111.322,97 atau 4,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(2.047.140,00)	(1.592.220,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(100.040.000,00)	(100.040.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(202.211.716,25)	(198.437.887,25)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(167.920.458,80)	(172.303.353,16)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair	(509.044.703,14)	(479.957.918,14)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(11.930.000,00)	(11.930.000,00)

8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.371.452.983,01)	(1.367.310.333,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(412.778.883,33)	(295.742.850,01)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(59.540.876,00)	(59.540.876,00)
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(221.722.000,00)	(221.722.000,00)
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(19.150.000,00)	(19.150.000,00)
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	-
	Jumlah	**(3.079.538.760,53)**	**(2.929.427.437,56)**

5.2.1.2.5.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Rp677.385.100,01)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp677.385.100,01) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp655.069.900,01) mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.315.200,00 atau 3,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(417.144.466,67)	(404.599.866,67)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(168.540.633,34)	(158.770.033,34)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(91.700.000,00)	(91.700.000,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Satelit	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	-	-

25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	-	-
51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	-	-
52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	-	-
53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	-	-
54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	-	-
55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	-	-
56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	-	-
59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	-	-
60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	-	-
61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	-	-
64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	-	-
65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	-	-

68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	-	-
69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	-	-
70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
	Jumlah	**(677.385.100,01)**	**(655.069.900,01)**

5.2.1.2.5.1.5 Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp 1.722.191.998,98)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.722.191.998,98) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.627.587.142,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp94.604.856,25 atau 5,49% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.164.814.365,99)	(1.067.918.824,32)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(272.680.000,00)	(272.680.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(281.040.341,32)	(259.793.526,74)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(2.057.291,67)	(25.594.791,67)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Jumlah	**(1.722.191.998,98)**	**(1.627.587.142,73)**

5.2.1.2.5.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp3.024.260.255,6)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp3.024.260.255,6) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.881.674.699,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp142.585.555,87 atau 4,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.975.934.255,60)	(2.835.981.699,73)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(48.326.000,00)	(45.693.000,00)
	Jumlah	**(3.024.260.255,60)**	**(2.881.674.699,73)**

5.2.1.2.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.975.934.255,6)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.975.934.255,6) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.835.981.699,73) mengalami **kenaikan** sebesar Rp139.952.555,87 atau 4,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	**(2.929.980.415,60)**	**(2.792.822.979,73)**
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	**(9.835.980,00)**	**(8.941.800,00)**
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	**-**	**-**
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	**-**	**-**
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	**-**	**-**
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	**-**	**-**

7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	**(36.117.860,00)**	**(34.216.920,00)**
33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-

	Jumlah	**(2.975.934.255,60)**	**(2.835.981.699,73)**

5.2.1.2.5.2.2 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp48.326.000,00)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp48.326.000,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp45.693.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.633.000,00 atau 5,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(3.600.000,00)	(3.000.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	(44.726.000,00)	(42.693.000,00)
	Jumlah	**(48.326.000,00)**	**(45.693.000,00)**

5.2.1.3 Aset Lainnya Rp123.166.330,04

Aset Lainnya sebesar Rp123.166.330,04 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.722.173,11 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.555.843,07 atau 21,41% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	369.689.460,00	371.457.780,00
4	Aset Lain-lain	512.601.059,00	1.741.301.417,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
	Jumlah	**123.166.330,04**	**156.722.173,11**

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud Rp369.689.460,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp369.689.460,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp371.457.780,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.768.320,00 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	369.689.460,00	371.457.780,00
2	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud	-	-
	Jumlah	**369.689.460,00**	**371.457.780,00**

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud Rp369.689.460,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp369.689.460,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp371.457.780,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.768.320,00 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-

4	Hak Paten	-	-
5	Software	369.689.460,00	371.457.780,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
	Jumlah	**369.689.460,00**	**371.457.780,00**

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain Rp512.601.059,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp512.601.059,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.741.301.417,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 1.228.700.358,00 atau 240% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	512.601.059,00	1.741.301.417,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
	Jumlah	**512.601.059,00**	**1.741.301.417,00**

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp246.523.129,96)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp246.523.129,96), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp218.271.606,89) mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.251.523,07 atau 12,94% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-
	Jumlah	**(246.523.129,96)**	**(218.271.606,89)**

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp512.601.059,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp512.601.059,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.737.765.417,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp1.225.164.358,00 atau 70,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
	Jumlah	**(512.601.059,00)**	**(1.737.765.417,00)**

5.2.2 EKUITAS Rp17.229.965.616,94

Ekuitas sebesar Rp17.229.965.616,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17.549.604.880,16 mengalami **penurunan** sebesar Rp319.639.263 atau 1,86% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.3 Ekuitas

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	Jumlah	**(178.865.432.349,06)**	**17.549.604.880,16**

5.2.2.1 Ekuitas

Ekuitas sebesar -Rp 178.865.432.349,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 17.549.604.880,16 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

5.3.3.1 Ekuitas

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	17.549.604.880,16	17.549.604.880,16
2	Surplus/Defisit-LO	(196.415.037.229,22)	-
	Jumlah	**(178.865.432.349,06)**	**17.549.604.880,16**

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3	PENJELASAN REKENING LAPORAN OPERASIONAL							
		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	
2	Beban	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
	Surplus/(Defisit) Operasional	**(195.738.624.266,00)**	**(724.996.237,24)**	**(52.119.274,02)**	**(196.411.501.229,22)**	**(858.201.565.827,64)**	**661.790.064.598,42**	**(77,11)**
3	Kegiatan Non Operasional	-	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**(195.738.624.266,00)**	**(728.532.237,24)**	**(52.119.274,02)**	**(196.415.037.229,22)**	**(858.201.565.827,64)**	**661.786.528.598,42**	**(77,11)**
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	**(195.738.624.266,00)**	**(728.532.237,24)**	**(52.119.274,02)**	**(196.415.037.229,22)**	**(858.201.565.827,64)**	**661.786.528.598,42**	**(77,11)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN DAERAH Rp 196.411.501.229,22

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 196.411.501.229,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 858.201.565.827,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp 661.790.064.598,42 atau 77,11% dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2	BEBAN DAERAH							
		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	195.738.624.266,00	724.996.237,24	52.119.274,02	196.411.501.229,22	858.201.565.827,64	(661.790.064.598,42)	(77,11)
3	Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**195.738.624.266,00**	**724.996.237,24**	**52.119.274,02**	**196.411.501.229,22**	**858.201.565.827,64**	**(661.790.064.598,42)**	**(77,11)**

Total Belanja Daerah **:Rp195.738.624.266,00**

Penambahan

- Penyesuaian Belanja : Rp724.996.237,24

Total Penambahan : Rp724.996.237,24

Pengurangan

- Penyesuaian Belanja : 52.119.274,02

Total Pengurangan : Rp52.119.274,02

Total Beban Daerah **: 196.411.501.229,22**

5.3.1.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 196.411.501.229,22

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp 196.411.501.229,22 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 858.201.565.827,64 mengalami **penurunan** sebesar Rp 661.790.064.598,42 atau 77,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	8.354.175.849,00	-	-	8.354.175.849,00	9.277.636.106,00	(923.460.257,00)	(9,95)
2	Beban Barang dan Jasa	18.546.058.417,00	29.003.341,58	52.119.274,02	18.522.942.484,56	19.432.724.144,14	(909.781.659,58)	(4,68)
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Hibah	168.838.390.000,00	-	-	168.838.390.000,00	828.885.626.000,00	(660.047.236.000,00)	(79,63)
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Pengisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	695.992.895,66	-	695.992.895,66	605.579.577,50	90.413.318,16	14,93
	Jumlah	**195.738.624.266,00**	**724.996.237,24**	**52.119.274,02**	**196.411.501.229,22**	**858.201.565.827,64**	**(661.790.064.598,42)**	**(77,11)**

Total Belanja Daerah **:Rp195.738.624.266,00**

Penambahan

- Penyesuaian Belanja : Rp724.996.237,24

Total Penambahan : Rp724.996.237,24

Pengurangan

- Penyesuaian Belanja : 52.119.274,02

Total Pengurangan : Rp52.119.274,02

Total Beban Daerah : 196.411.501.229,22

5.3.1.1.1 Beban Pegawai Rp 8.354.175.849,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 8.354.175.849,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 9.277.636.106,00 mengalami penurunan sebesar Rp 923.460.257,00 atau 9,95% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.837.565.320,00	-	-	3.837.565.320,00	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	
8	Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-	
9	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**8.354.175.849,00**	-	-	**8.354.175.849,00**	**9.277.636.106,00**	**(923.460.257,00)**	**(9,95)**

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.831.682.142,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp 3.831.682.142,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.909.549.190,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 77.867.048,00 atau 1,99% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.892.407.927,00	-	-	2.892.407.927,00	2.891.795.600,00	612.327,00	0,02
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	253.721.267,00	-	-	253.721.267,00	269.843.030,00	(16.121.763,00)	(5,97)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	102.130.000,00	-	-	102.130.000,00	138.740.000,00	(36.610.000,00)	(26,39)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	81.900.000,00	-	-	81.900.000,00	79.940.800,00	1.959.200,00	2,45
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.410.000,00	-	-	84.410.000,00	92.530.000,00	(8.120.000,00)	(8,78)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	140.301.680,00	-	-	140.301.680,00	140.784.480,00	(482.800,00)	(0,34)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.373.557,00	-	-	24.373.557,00	22.793.470,00	1.580.087,00	6,93
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.790,00	-	-	37.790,00	39.426,00	(1.636,00)	(4,15)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	234.750.261,00	-	-	234.750.261,00	249.358.710,00	(14.608.449,00)	(5,86)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.883.178,00	-	-	-	5.930.880,00	(5.930.880,00)	(100,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	17.649.660,00	-	-	17.649.660,00	17.792.794,00	(143.134,00)	(0,80)
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	
13	Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	
14	Beban Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-	
15	Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**3.837.565.320,00**	-	-	**3.831.682.142,00**	**3.909.549.190,00**	**(77.867.048,00)**	**(1,99)**

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp 4.516.610.529,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp 4.516.610.529,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 5.150.726.916,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 634.116.387,00 atau 12,31% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**4.516.610.529,00**	-	-	**4.516.610.529,00**	**5.150.726.916,00**	**(634.116.387,00)**	**(12,31)**

5.3.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp217.360.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 217.360.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp217.360.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Honorarium	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	
9	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-	
10	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-	
11	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	-	-	-	-	-	-	
12	Beban Tunjangan Khusus bagi Pengelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P1	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	**217.360.000,00**	**(217.360.000,00)**	**(100,00)**

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 18.522.942.484,56

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 18.522.942.484,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 19.432.724.144,14 mengalami **penurunan** sebesar Rp 909.781.659,58 atau 4,68% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	3.064.078.311,00	10.967.000,00	698.000,00	3.074.347.311,00	2.642.986.100,00	431.361.211,00	16,32
2	Beban Jasa	11.008.345.665,00	18.036.341,58	51.421.274,02	10.974.960.732,56	8.674.545.087,14	2.300.415.645,42	26,52
3	Beban Pemeliharaan	463.687.016,00	-	-	463.687.016,00	578.339.528,00	(114.652.512,00)	(19,82)
4	Beban Perjalanan Dinas	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyar	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-	-	
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**18.546.058.417,00**	**29.003.341,58**	**52.119.274,02**	**18.522.942.484,56**	**19.432.724.144,14**	**(909.781.659,58)**	**(4,68)**

Total Belanja Barang dan Jasa : Rp18.546.058.417,00

Penambahan

- Persediaan Awal : Rp10.967.000,00
- Penyesuaian Belanja Dibayar Di Muka : Rp18.036.341,58

Total Penambahan : Rp29.003.341,58

Pengurangan

- Persediaan Akhir : Rp 698.000,00
- Penyesuaian Belanja Dibayar Di Muka : Rp 18.689.594,02
- Kapitalisasi Aset Tak Berwujud : Rp 32.731.680,00

Total Pengurangan : Rp 52.119.274,02

Total Beban Barang dan Jasa : Rp18.522.942.484,56

5.3.1.1.2.1 Beban Barang Rp 3.074.347.311,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp 3.074.347.311,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.642.986.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 431.361.211,00 atau 14,03% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	2.863.864.400,00	10.967.000,00	698.000,00	2.874.133.400,00	2.642.986.100,00	231.147.300,00	8,75
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	200.213.911,00	-	-	200.213.911,00	-	200.213.911,00	
	Jumlah	**3.064.078.311,00**	**10.967.000,00**	**698.000,00**	**3.074.347.311,00**	**2.642.986.100,00**	**431.361.211,00**	**16,32**

Total Belanja Barang : Rp3.064.078.311,00

Penambahan

- Persediaan Awal : Rp10.967.000,00

Total Penambahan : Rp10.967.000,00

Pengurangan

- Persediaan Akhir : Rp698.000,00

Total Pengurangan : Rp698.000,00

Total Beban Barang : Rp 3.074.347.311,00

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa Rp 10.974.960.732,56

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp 10.974.960.732,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.674.545.087,14 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.300.415.645,42 atau 20,96% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	10.668.339.699,00	-	32.731.680,00	10.635.608.019,00	8.221.307.744,00	2.414.300.275,00	29,37
2	Beban Jasa Asuransi	158.789.115,00	18.036.341,58	18.689.594,02	158.135.862,56	168.001.343,14	(9.865.480,58)	(5,87)
3	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	98.350.000,00	-	-	98.350.000,00	115.546.000,00	(17.196.000,00)	(14,88)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	18.800.000,00	-	-	18.800.000,00	109.690.000,00	(90.890.000,00)	(82,86)
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-		-		
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-	-	-	-	
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	64.066.851,00	-	-	64.066.851,00	60.000.000,00	4.066.851,00	6,78
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	
16	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	
17	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**11.008.345.665,00**	**18.036.341,58**	**51.421.274,02**	**10.974.960.732,56**	**8.674.545.087,14**	**2.300.415.645,42**	**26,52**

Total Belanja Jasa : Rp11.008.345.665,00

Penambahan

- Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp18.036.341,58

Total Penambahan : Rp18.036.341,58

Pengurangan

- Belanja Dibayar Di Muka Akhir : Rp18.689.594,02
- Kapitalisasi Aset Tak Berwujud : Rp 32.731.680,00

Total Pengurangan : Rp51.421.274,02

Total Beban Jasa : Rp10.974.960.732,56

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp 463.687.016,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 463.687.016,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 578.339.528,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 114.652.512,00 atau 19,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.991.744,00	-	-	85.991.744,00	299.953.158,00	(213.961.414,00)	(71,33)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	377.695.272,00	-	-	377.695.272,00	278.386.370,00	99.308.902,00	35,67
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-		-	-	
	Jumlah	**463.687.016,00**	-	-	**463.687.016,00**	**578.339.528,00**	**(114.652.512,00)**	**(19,82)**

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp 4.009.947.425,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp 4.009.947.425,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.536.853.429,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 3.526.906.004,00 atau 46,80% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**4.009.947.425,00**	-	-	**4.009.947.425,00**	**7.536.853.429,00**	**(3.526.906.004,00)**	**(46,80)**

5.3.1.1.3 Beban Hibah Rp 168.838.390.000,00

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp 168.838.390.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 828.885.626.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 660.047.236.000,00 atau 79,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000,00	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbad	99.669.738.000,00	-	-	99.669.738.000,00	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51
6	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
8	Beban Hibah Dana BOSP	-	-	-	-	-	-	
9	Beban Hibah kepada BUMDesa	-	-	-	-	-	-	
10	Beban Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**168.838.390.000,00**	-	-	**168.838.390.000,00**	**828.885.626.000,00**	**(660.047.236.000,00)**	**(79,63)**

5.3.1.1.3.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp 31.082.470.000,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 31.082.470.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 708.739.472.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 677.657.002.000,00 atau 95,61% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	31.082.470.000	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000	(677.657.002.000,00)	(95,61)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**31.082.470.000,00**	-	-	**31.082.470.000,00**	**708.739.472.000,00**	**(677.657.002.000,00)**	**(95,61)**

5.3.1.1.3.2 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp 38.086.182.000,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp 38.086.182.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 35.328.599.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.757.583.000,00 atau 7,24% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
	Jumlah	**38.086.182.000,00**	-	-	**38.086.182.000,00**	**35.328.599.000,00**	**2.757.583.000,00**	**7,81**

5.3.1.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 695.992.895,66

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 695.992.895,66 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 605.579.577,5 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 90.413.318,16 atau 13% dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	490.655.816,72	409.345.449,46	81.310.367,26	19,86
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	142.585.555,87	136.436.623,72	6.148.932,15	4,51
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	62.751.523,07	59.797.504,32	2.954.018,75	4,94
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	
8	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	
9	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	
	Jumlah	**695.992.895,66**	**605.579.577,50**	**90.413.318,16**	**14,93**

5.3.1.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp 490.655.816,72

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 490.655.816,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 409.345.449,46 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 81.310.367,26 atau 16,57% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	-	-	-	
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	72.128.437,50	72.128.437,50	-	-
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	235.306.322,97	147.818.124,46	87.488.198,51	59,19
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.315.200,00	38.132.133,34	(15.816.933,34)	(41,48)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	
10	Beban Penyusutan Komputer	160.905.856,25	151.266.754,16	9.639.102,09	6,37
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	
	Jumlah	**490.655.816,72**	**409.345.449,46**	**81.310.367,26**	19,86

5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp 142.585.555,87

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 142.585.555,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 136.436.623,72 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 6.148.932,15 atau 4,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	139.952.555,87	133.803.623,72	6.148.932,15	4,60
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.633.000,00	2.633.000,00	-	-
	Jumlah	**142.585.555,87**	**136.436.623,72**	6.148.932,15	4,51

5.3.1.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp 62.751.523,07

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp 62.751.523,07 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 59.797.504,32 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.954.018,75 atau % dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp3.536.000,00)

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar (Rp3.536.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp 3.536.000,00) atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Non Operasional	-	-	-	
2	Defisit Non Operasional	(3.536.000,00)	-	(3.536.000,00)	
	Jumlah	**(3.536.000,00)**	-	**(3.536.000,00)**	

5.3.2.1 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp 3.536.000,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.536.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	
	Jumlah	**3.536.000,00**	-	**3.536.000,00**	

5.3.2.1.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Rp 3.536.000,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	
2	Defisit Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	
4	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	
	Jumlah	**3.536.000,00**	-	**3.536.000,00**	

5.3.2.1.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp 3.536.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.536.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan Tanah-LO	-	-	-	
2	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	-	-	-	
3	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	-	-	-	
4	Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO	-	-	-	
5	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	-	-	-	
6	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	-	-	-	
7	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO	-	-	-	
8	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	3.536.000,00	-	3.536.000,00	
	Jumlah	**3.536.000,00**	-	**3.536.000,00**	

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024		Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27
2	Surplus/Defisit-LO	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
3	RK-PPKD	196.095.397.966,00	858.737.253.837,00	-	-
4	Koreksi	-	20.021.875,00	(20.021.875,00)	(100,00)
	Ekuitas Akhir	**17.229.965.616,94**	**17.549.604.880,16**	**662.322.216.607,78**	**(173,84)**

5.4.1 Ekuitas Awal Rp17.549.604.880,16

Saldo Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp17.549.604.880,16 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27
	Jumlah	**17.549.604.880,16**	**16.993.894.995,80**	**555.709.884,36**	**3,27**

5.4.2 Surplus/Defisit – LO Rp Rp196.415.037.229,22

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp196.415.037.229,22) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2025.

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit LO	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
	Jumlah	**(196.415.037.229,22)**	**(858.201.565.827,64)**	**661.786.528.598,42**	**(77,11)**

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp,00

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp,00,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Investasi	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Investasi	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	(55.726.900,00)	55.726.900,00	-
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	75.748.775,00	(75.748.775,00)	-
10	Koreksi/Penyesuaian Aset	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	-	-	-
13	Koreksi/Penyesuaian Properti	-	-	-	-
14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	-	-	-
15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-	-	-
16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**20.021.875,00**	**(20.021.875,00)**	**(100,00)**

5.4.4 Ekuitas Akhir Rp,00

Ekuitas akhir sebesar Rp,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16	662.322.216.607,78	**(173,84)**
	Jumlah	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16	662.322.216.607,78	**(173,84)**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 6
PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

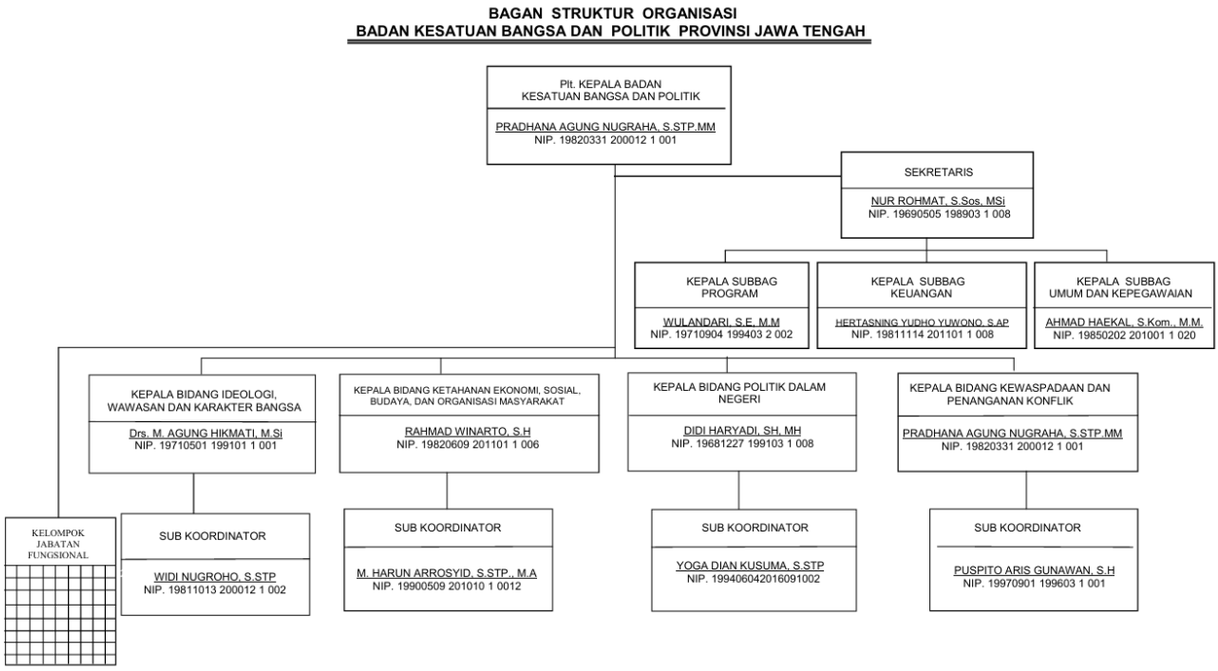
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1) Subbagian Program;
    2) Subbagian Keuangan;
    3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa
d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan
e. Bidang Politik Dalam Negeri
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

g. Kelompok Jabatan Fungsional



6.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Strategi :

   a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawwasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
   b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

   Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

   Strategi :

   a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
   b. Peningkatan kapasitas kelembangaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

   Arah Kebijakan :

   a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui otimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

   Strategi :

   a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

   Arah Kebijakan :

   a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

   Strategi :

   a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
   b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

   Arah Kebijakan :

   a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
   b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

   Strategi :

   a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
   b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

   Arah Kebijakan :

   a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
   b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.1. Data Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah 71. Terdiri dari 46 pegawai PNS, 10 PPPK, dan 15 PPPK paruh waktu.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Status Pegawai

Status Pegawai	Jumlah
PNS	46
PPPK	10
PPPK Paruh Waktu	15
Total	**71**

Sedangkan, berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 14 orang pegawai berpendidikan S2 (Pasca Sarjana), 42 orang berpendidikan S1/DIV, 4 orang berpendidikan Diploma III, 11 orang berpendidikan SMA.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	14
Strata 1 / Diploma IV	42
Diploma III	4
SMA	11
Total	**71**

6.2. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB VII

PENUTUP

BAB 7
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2025. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.1.1/0011108 Tanggal 19 Nopember 2025 tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAKESBANGPOL

PRADHANA AGUNG NUGRAHA , S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19820331 200012 1 001

Dipindai dengan CamScanner